

TESIS

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH
MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH**



Diajukan oleh

TAUFIK RAHMAN

NIM. 2420215310069

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH
MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH**



Diajukan oleh

TAUFIK RAHMAN

NIM. 2420215310069

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH
MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

TAUFIK RAHMAN

NIM. 2420215310069

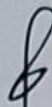
**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judu Tesis : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH
MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI
DAERAH**

**Nama : Taufik Rahman
NIM : 2420215310069**

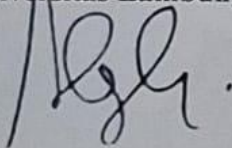
**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

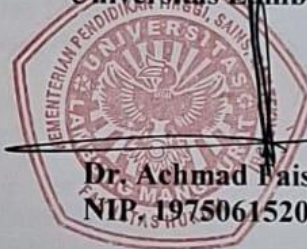
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

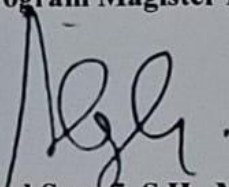
**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



**Dr. Sapruhin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Rahman
NIM : 2420215310069
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

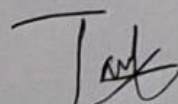
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Taufik Rahman

NIM. 2420215310069

RAHMAN, TAUFIK. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 122 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan antara kewenangan kepala daerah dalam menetapkan upah minimum dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka prinsip otonomi daerah. Penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, serta keberlanjutan dunia usaha di daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang menganut prinsip desentralisasi, kepala daerah diberikan kewenangan atribusi untuk menetapkan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam sistem negara hukum yang demokratis setiap penggunaan kewenangan publik harus berada dalam mekanisme checks and balances. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah, termasuk kebijakan penetapan upah minimum. Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup dan batas kewenangan DPRD dalam mengawasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara normatif bagaimana kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum serta bagaimana batas-batas kewenangan tersebut menurut peraturan perundang-undangan dalam kerangka prinsip otonomi daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum berdasarkan prinsip otonomi daerah serta untuk mengkaji batas kewenangan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kejelasan konseptual mengenai hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi pengawasan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi normatif fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan strategis daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan fungsi masing-masing secara proporsional, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang selaras dengan prinsip negara hukum dan otonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang mengatur kewenangan DPRD dan kepala daerah, terutama yang berkaitan

dengan fungsi pengawasan dan penetapan upah minimum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan normatif dari ketentuan hukum yang berlaku. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori kewenangan dan teori pengawasan dalam negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum merupakan kewenangan konstitusional dan atributif yang bersumber dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah. Ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengujian aspek legalitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengubah besaran upah minimum, karena kewenangan tersebut secara normatif berada pada kepala daerah sebagai pejabat eksekutif yang diberi atribusi oleh undang-undang. Batas kewenangan DPRD terletak pada larangan melakukan intervensi substantif terhadap materi kebijakan, sehingga fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor kontrol legislatif tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD dalam penetapan upah minimum mencerminkan mekanisme checks and balances dalam sistem otonomi daerah yang bertujuan menjamin legalitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan pengupahan di daerah.

RAHMAN, TAUFIK. 2026. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 122 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan Penetapan Upah Minimum, Prinsip Otonomi Daerah.

Penelitian ini berjudul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum serta batas kewenangan tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berguna untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai hubungan kewenangan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah serta memperkuat konstruksi normatif fungsi pengawasan DPRD. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. DPRD berwenang mengawasi kebijakan kepala daerah melalui fungsi pengawasan yang meliputi pengujian legalitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi prinsip checks and balances dalam kerangka otonomi daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa batas kewenangan DPRD terletak pada larangan melakukan intervensi terhadap substansi besaran upah minimum yang menjadi kewenangan atribusi kepala daerah. DPRD tidak berwenang menetapkan, mengubah, atau membatalkan kebijakan tersebut secara langsung, melainkan hanya dapat menggunakan instrumen pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD mencerminkan pembagian kekuasaan yang seimbang dalam sistem negara hukum dan otonomi daerah.

RAHMAN, TAUFIK. 2026. THE AUTHORITY OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN SUPERVISING THE DETERMINATION OF MINIMUM WAGES BASED ON THE PRINCIPLE OF REGIONAL AUTONOMY. Master of Laws Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 122 pages.

ABSTRACT

Keywords: Regional House of Representatives, Supervision of Minimum Wage Determination, Principle of Regional Autonomy.

This research is entitled The Authority of the Regional House of Representatives in Supervising the Determination of Minimum Wages Based on the Principle of Regional Autonomy. The study aims to analyze the authority of the Regional House of Representatives (DPRD) in supervising the determination of minimum wages and to examine the limits of such authority under statutory regulations. This research is intended to provide conceptual clarity regarding the relationship between legislative and executive powers within the regional government system and to strengthen the normative construction of DPRD's supervisory function. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning.

The findings indicate that DPRD's authority in supervising the determination of minimum wages constitutes an attributive authority derived from the Law on Regional Government. DPRD exercises its supervisory function by examining legality, procedural compliance, accountability, transparency, and adherence to general principles of good governance. This authority reflects the implementation of checks and balances within the framework of regional autonomy.

The study further concludes that the limits of DPRD's authority lie in the prohibition against intervening in the substantive determination of minimum wage levels, which falls under the attributive authority of the regional head. DPRD is not authorized to determine, amend, or revoke the minimum wage policy directly, but may only utilize supervisory instruments as regulated by law. Therefore, the relationship between the regional head's authority and DPRD's supervisory function demonstrates a balanced distribution of power within a rule of law state and regional autonomy system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini disusun melalui proses akademik yang panjang, penuh dinamika pemikiran, serta tantangan intelektual yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam proses penyelesaian studi.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing penulisan Tesis, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Magister Hukum yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pelayanan administrasi selama masa studi.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum yang telah memberikan semangat, diskusi ilmiah, serta kebersamaan yang berarti selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemerintahan daerah dan ketenagakerjaan, serta menjadi kontribusi akademik bagi praktik penyelenggaraan otonomi daerah yang berlandaskan prinsip negara hukum.

Akhirnya, penulis berharap agar hasil penelitian ini tidak hanya berhenti sebagai pemenuhan kewajiban akademik semata, tetapi juga dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan serta fungsi pengawasan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Penulis juga berharap bahwa kajian ini dapat membuka ruang diskursus akademik yang lebih luas mengenai hubungan kewenangan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip negara hukum dan keseimbangan kekuasaan.

Semoga segala upaya dan kerja keras dalam penyusunan tesis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perkembangan ilmu hukum serta praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penulis menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT atas segala kekurangan dalam karya ini dan memohon ampun atas segala keterbatasan yang ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah ke depan.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis,

Taufik Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	28
 BAB II KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH.....	 29
A. Kedudukan dan Dasar Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah...	29
B. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penetapan Upah Minimum.....	43
C. Konstruksi Normatif Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Penetapan Upah Minimum.....	60

BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENETAPAN UPAH MINIMUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	76
A. Dasar Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan.....	76
B. Kewenangan Kepala Daerah dalam Penetapan Upah Minimum sebagai Objek Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	89
C. Ruang Lingkup Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penetapan Upah Minimum.....	113
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA